

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Alimuddin Siregar. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta Timur.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*. Kencana. Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Eddy O.S. Hiariej. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Rajawali Printing. Depok.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. SinarGrafika. Jakarta Timur.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (Edisi Pertama)*. Kencana. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Ciptka. Jakarta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Unpam Press. Banten.

- P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- R. Abdoel Djamali. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Yulies Tiena Masriani. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

- Ayya Sofia Istifarrah. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik. *Jurnal Jurist-Diction*. Volume 3. Nomor 4.
- Dean Praditya Kemiter, dkk. 2021. Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*. Volume IX Nomor 4.
- Dwi Hanata. 2018. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7 Nomor 1.
- Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum. 2021. Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn. *Jurnal USM Law Review*. Volume 4. Nomor 1.
- Hwian Christianto. 2017. Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (Vej)*. Volume 3. Nomor 2.
- Ismail Navianto. 2012. Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia. *Jurnal Risalah Hukum*. Volume 8 Nomor 1.
- Josef M. Monteiro. 2007. Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Volume 25 Nomor 2.

- Ni Putu Winny Arisanti dan I Wayan Bela Siki Layang. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*. Volume 9 Nomor 2.
- Sandro Unas. 2019. Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Et Societatis*. Volume VII Nomor 4.
- Syarifah Dewi Indawati S. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*. Volume 5 Nomor 2.
- Tessalonika Novela Pangaila. 2016. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Umum. *Jurnal Lex Privatum*. Volume IV Nomor 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

SKRIPSI

Ike Setyarini. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Maharani. 2018. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dilakukan oleh Anak*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Tiara Robiatul Adawiyah. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

PUTUSAN

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap.putusan.mahkamahagung.go.id. Diunduh pada tanggal 8 Februari 2022.